



Seorang guru sedang mendampingi muridnya memahami konteks bencana alam melalui sesi refleksi
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Menciptakan Pendidikan Inklusif dan Aman Bencana di Kabupaten Lombok Barat

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Lombok Barat: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Lombok Barat belum menguasai kemampuan dasar dengan baik. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Lombok Barat meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (khususnya berbasis gender) di sekolah, perlakuan terhadap murid yang didasari stereotip gender tradisional, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta terbatasnya kesadaran dan pengetahuan mengenai isu dan dampak perubahan iklim.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpercaya dan responsif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin, (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan, serta (5) mendorong koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 44,16; perempuan 49,92

Numerasi : Laki-laki 34,65; perempuan 36,16

Masing-masing skor tersebut lebih rendah sekitar satu poin dari nilai rata-rata provinsi, kecuali skor literasi murid perempuan yang sedikit di atas nilai rata-rata provinsi. Selain itu, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, rendahnya hasil belajar dan perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Lombok Barat, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu ditingkatkan.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Lombok Barat pada Mei 2025. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 2-5 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Banyak kasus kekerasan terjadi di madrasah dan murid perempuan rentan menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut. Hal ini dapat terjadi, salah satunya, karena penggunaan media sosial tanpa pengawasan orang tua.

Selain itu, persepsi terhadap peran dan tanggung jawab murid masih terbatas pada stereotip gender tradisional. Murid perempuan umumnya menempuh pendidikan hanya sampai SMA karena mereka diharapkan menikah setelahnya. Sedangkan, murid laki-laki dapat menempuh pendidikan lebih tinggi karena harus mencari uang dan menafkahi keluarga. Persepsi ini bisa membatasi capaian belajar dan aspirasi murid.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 2.526 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 27% tidak sekolah dan 73% bersekolah. Mereka belajar di sekolah yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif (47%), sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif (12%), atau sekolah luar biasa/SLB (14%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dan tenaga pendukung (guru pendamping, dokter, dan terapis) dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun terus berkembang di masyarakat, sehingga mereka seringkali tidak daftarkan ke sekolah.

Di sisi lain, masih banyak murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid di daerah terpencil, murid dengan orang tua merantau (pekerja migran), dan murid belum bisa berbahasa Indonesia.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Lombok Barat mencapai 116,9 dari 250. Angka tersebut lebih tinggi dari indeks Nusa Tenggara Barat (115,31), tetapi masih di bawah indeks Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Menurut IRBI, tanah longsor berisiko tinggi di kabupaten ini.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menginisiasi berbagai kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti aturan penggunaan plastik sekali pakai, bank sampah, dan Program Kampung Iklim (ProKlim). Beberapa sekolah pun sudah memasukkan pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler terkait lingkungan dalam kurikulumnya. Namun, langkah ini belum menyentuh tingkat kesadaran dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Perkawinan anak

Perkawinan anak yang didorong oleh faktor ekonomi dan budaya merupakan salah satu penyebab anak perempuan putus sekolah, mengalami masalah kesehatan, dan menjadi korban kekerasan.



Norma dan praktik budaya

Norma dan praktik budaya lokal membuat anak perempuan dan laki-laki didorong untuk menjalankan peran dan tanggung jawab tertentu. Hal ini turut melanggengkan perkawinan anak yang merugikan anak perempuan maupun laki-laki.



Absensi orang tua

Anak-anak dengan orang tua pekerja migran seringkali tinggal bersama kakek-nenek atau kerabat lainnya, sehingga mereka tidak memperoleh pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan secara optimal. Hal ini bisa menghambat tumbuh kembang mereka serta meningkatkan risiko putus sekolah, terlibat dalam kekerasan, dan perkawinan anak.



Hambatan majemuk

Kombinasi antara kemiskinan, keterpencilan, migrasi, bahasa, dan gender—misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil—dapat meningkatkan risiko pengucilan dan hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.



Putus sekolah akibat perubahan iklim

Bencana akibat perubahan iklim, seperti banjir dan tanah longsor, seringkali memutus akses ke sekolah, sehingga anak perempuan cenderung putus sekolah dan anak laki-laki terpaksa bekerja.

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan & Kantor Kementerian Agama: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

1. Memperluas sosialisasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Satuan Pendidikan Ramah Anak, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
2. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas dan TPPK dapat mengadvokasi program pencegahan kekerasan (pendidikan karakter dan tindakan disiplin positif), mengawasi proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, memfasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan murid, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid yang terlibat.
3. Memperluas jangkauan program Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual (PPTKS) agar semakin efektif mencegah kasus kekerasan di sekolah dan perkawinan anak.
4. Mengintegrasikan isu kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dalam pembelajaran. Integrasi dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai secara langsung pada mata pelajaran tertentu atau lintas mata pelajaran (intrakurikuler) atau program penguatan karakter (kokurikuler atau ekstrakurikuler).



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui dashboard Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
2. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
3. Mengupayakan pendanaan atau penyaluran dana bantuan kepada sekolah dan keluarga murid penyandang disabilitas, sehingga dapat saling mendukung dan memenuhi kebutuhan murid.
4. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar) secara langsung ke masyarakat, terutama bagi murid dari keluarga miskin. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Memperluas sosialisasi kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah berjalan (seperti pengelolaan sampah rumah tangga, penggunaan plastik sekali pakai, ProKlim, dan program Kecil Menanam, Dewasa Memanen), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media digital. Dengan begitu, kebijakan dan program tersebut bisa dipahami masyarakat, kemudian meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku mereka.
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pendidikan untuk merancang skema evakuasi bencana dan meningkatkan respons terhadap bencana di sekolah.



Bappeda: Mendorong dan memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga penerapan kebijakan dan pemberian dukungan (terutama bagi murid penyandang disabilitas dan murid korban kekerasan) dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran